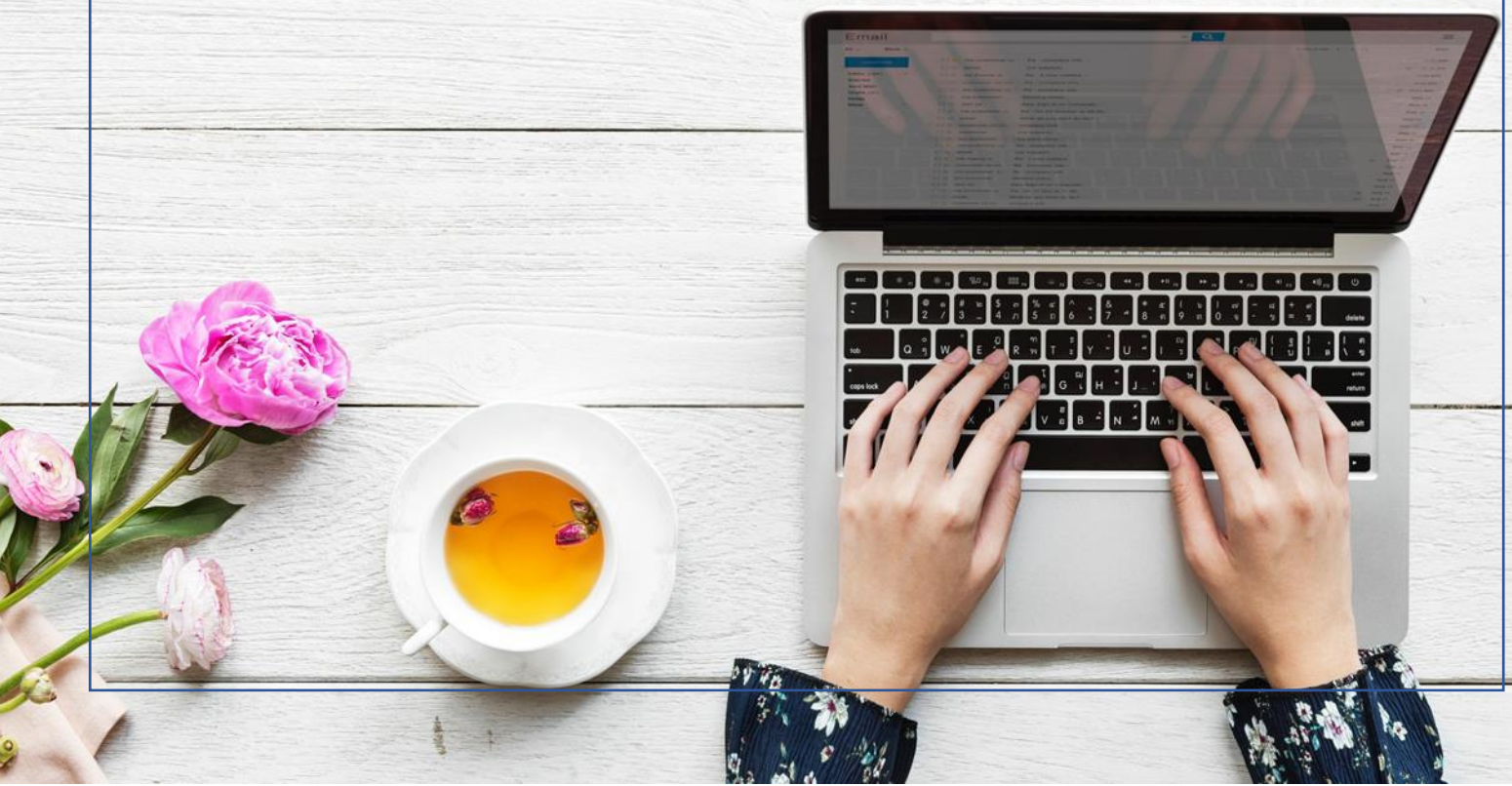


Gambaran Hubungan Kebijakan Anggaran Pemerintah Desa dengan Kemandirian Desa

Gesang Cholining Verdani





RINGKASAN KAJIAN

Belanja penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa merupakan dua jenis belanja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan ketahanan sosial suatu desa. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel mampu memberikan pengaruh terhadap terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan total pelayanan sosial yang dinamis, sensitif dan komprehensif serta partisipasi masyarakat dan pengendalian terhadap konflik dan kearifan lokal (Bahransyaf & Probosiwi, 2013). Namun, kebijakan terkait belanja penyelenggaraan pemerintah desa juga perlu diwaspadai karena meskipun meningkatkan ketahanan sosial, namun memiliki dampak sebaliknya terhadap ketahanan lingkungan.

Sebaliknya, pemberdayaan masyarakat perlu ditelaah kembali karena secara empiris terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap ketahanan ekonomi suatu desa. Hal ini mungkin diakibatkan oleh ketergantungan terhadap bantuan dana dari luar pada program pemberdayaan masyarakat. Bukti yang serupa juga pernah diteliti, dimana hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat lebih berdampak secara sosial daripada ekonomi (Ramadhoan, 2015).

Dari segi pendapatan, pemerintah desa dapat mengoptimalkan penyertaan modal desa untuk memberikan daya ungkit terhadap kemandirian desa, terutama ketahanan ekonominya. Pemerintah desa dapat memotivasi warga untuk mendukung penggunaan dana desa secara tepat dengan kebersamaan komunikasi, partisipasi dan akses informasi yang baik (Epa & Rais, 2019).

KAJIAN EMPIRIS

Berdasarkan Keputusan Menteri PDDT Nomor 16 Tahun 2018, desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan. Selain itu, desa mandiri juga berkaitan dengan kemampuan desa untuk mengatur dan membangun dengan memaksimalkan potensi yang ada di desa dan kemampuan masyarakatnya serta tidak bergantung pada bantuan pihak luar.

Beberapa hal yang perlu dikembangkan untuk menuju kemandirian desa adalah sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam yang tersedia, kemampuan menunjang pembangunan sendiri, dan sebagainya (Priyono, dkk, 2019). Beberapa klausul di atas menyiratkan adanya korelasi yang erat antara kemandirian desa dan bagaimana sebuah desa menyusun rencana kegiatan desa yang tercermin dalam anggaran yang disusunnya.

Analisis telah membuktikan adanya pengaruh kuat antara rasio likuiditas dan rasio *leverage* terhadap otonomi regional baik simultan maupun parsial (Hadi, 2010). Selain itu, pengaruh yang positif dan signifikan juga terbukti dimiliki oleh rasio kemandirian daerah dan tingkat pertumbuhan ekonominya (Sholikhah, 2011). Untuk itu, kajian singkat ini bermaksud mengelaborasi penggunaan data anggaran pendapatan dan belanja desa yang diperoleh dari pengolahan data siswaskeudes dengan data Indeks Desa Mandiri (IDM) dari Kementerian PDDT untuk memperoleh gambaran dan simpulan awal atas pengaruh kebijakan pemerintah desa yang tercermin dalam anggaran yang disusunnya dengan kemandirian suatu desa.

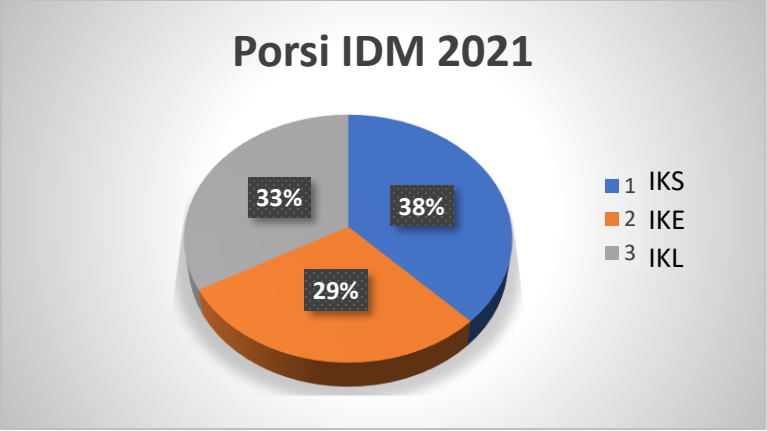
Metodologi

Kajian ini menggunakan pendekatan positivisme dengan analisis data eksploratori serta regresi. Sumber data diperoleh dari hasil pengolahan data siswaskeudes serta data IDM 2021 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pengukuran Kebijakan Anggaran Pemerintah Desa dilakukan dengan menggunakan data Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa dari 40% dari jumlah desa di Indonesia atau sekitar 36.577 baris data. Adapun Kemandirian Desa tampak pada data Indeks Desa Mandiri (IDM) dari sejumlah 73.836 baris data. Dataset kemudian dibuat hingga menghasilkan sejumlah 12 (dua belas) variabel yang diolah ke dalam tujuh persamaan regresi.

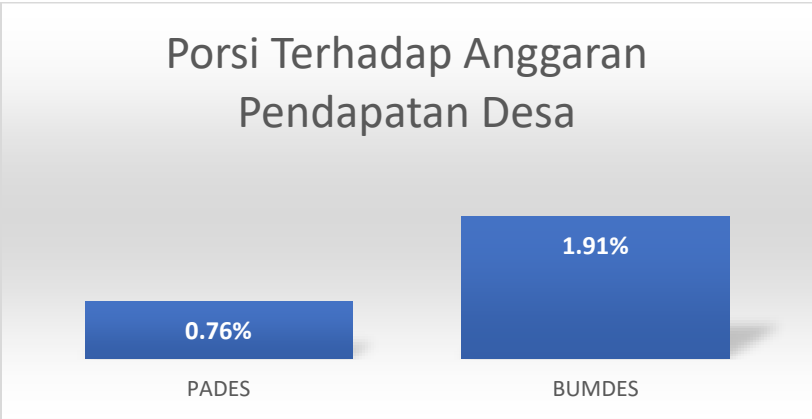
Persiapan data meliputi *cleansing* dan normalisasi. sehingga data yang siap untuk diolah adalah sejumlah 5.445 baris data. Jumlah ini memenuhi kriteria sampel berdasarkan rumus Slovin untuk $N = 73.836$ dengan minimal jumlah sampel sebesar 383 data. Untuk memastikan model regresi tepat, sebelum pengujian utama, data diuji dalam beberapa aspek, meliputi: uji validitas, reliabilitas, normalitas, linearitas, independent, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Hasil Analisis Deskriptif

Berikut adalah gambaran proporsi anggaran pemerintah desa pada 5.445 entitas di Indonesia:

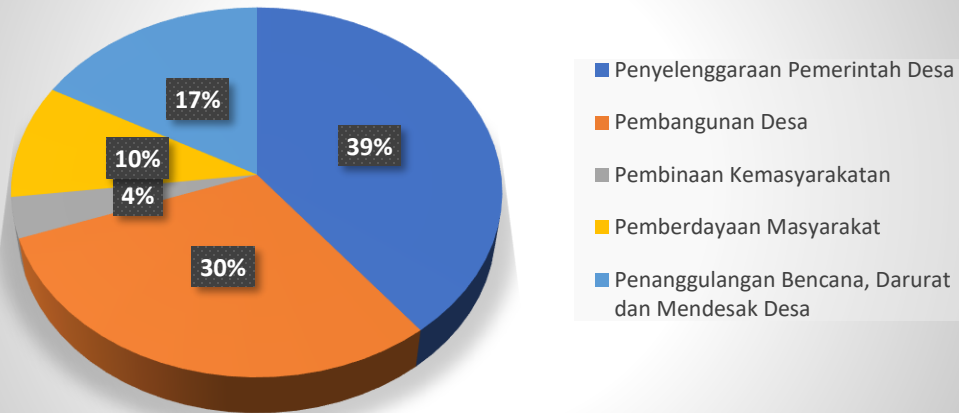


Pada proporsi pembentuk IDM, nilai tertinggi adalah IKS atau Indeks Ketahanan Sosial, diikuti oleh IKE (Indeks Ketahanan Ekonomi) dan IKL (Indeks Ketahanan Lingkungan).



Series1 adalah Anggaran Pendapatan Asli Desa (PAD) sedangkan Series2 adalah Penyertaan Modal Desa (PMD). Dapat dilihat bahwa proporsi keduanya berbeda jauh. Total anggaran PMD adalah Rp176,378,193,247.35 atau 1,91% dari keseluruhan anggaran pendapatan. Adapun anggaran PAD adalah Rp70,309,863,623.82 atau 0,76% dari keseluruhan anggaran pendapatan.

Anggaran Belanja Desa Berdasarkan Bidang



Dari segi anggaran belanja desa, proporsi terbesar adalah belanja bidang penyelenggaraan pemerintah desa (PEMDES), diikuti oleh bidang pembangunan desa (BANDES). Selanjutnya, proporsi yang lebih kecil adalah bidang penanggulangan bencana, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan masyarakat.

Hasil Regresi

Selanjutnya, uji regresi linear dilakukan hingga diperoleh beberapa persamaan sebagai berikut:

1. Korelasi Indeks Desa Mandiri (IDM) dengan Anggaran Belanja Desa berdasarkan Bidang

Regresi pertama ditujukan untuk melihat bagaimana anggaran belanja desa berdasarkan bidang memengaruhi IDM suatu desa. Hasil regresi menunjukkan bahwa diantara lima anggaran belanja, hanya dua yang memiliki pengaruh signifikan terhadap IDM. Berikut adalah persamaan regresi yang diperoleh:

$$\text{IDM} = 0.664 + 0.027\text{PEMDES} + 0.013 \text{ BANDES}$$

Dimana:

IDM = Indeks Desa Mandiri

PEMDES = Anggaran Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (data kelompok milyar rupiah)

BANDES = Anggaran Belanja Bidang Pembangunan Desa (data kelompok milyar rupiah)

Persamaan ini mengeliminasi beberapa variabel independen yang ternyata terbukti secara statistik tidak signifikan dalam memengaruhi IDM, yaitu Anggaran Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa.

2. Korelasi masing-masing komponen IDM terhadap Anggaran Belanja Desa berdasarkan Bidang

Dengan cara yang sama, berikut adalah model regresi untuk menjelaskan pengaruh atas kebijakan pemerintah desa yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja terhadap IDM serta komponen-komponennya yaitu IKS, IKE dan IKL:

$$\text{IKS} = 0.744 + 0.046\text{PEMDES} + 0.015\text{BANDES}$$

$$\text{IKE} = 0.563 + 0.062\text{PEMDES} + 0.020\text{BANDES} - 0,068\text{DAMAS}$$

$$\text{IKL} = 0.685 - 0.021\text{PEMDES}$$

Dimana:

IKS = Indeks Ketahanan Sosial
 IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi
 IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan
 DAMAS = Anggaran Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat (data kelompok milyar rupiah)

Ketiga komponen IDM berkorelasi secara berbeda dengan masing-masing anggaran belanja. Namun demikian, terdapat kesamaan dimana anggaran belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (PEMDES) memiliki korelasi dengan IKS, IKE maupun IKL. Namun demikian, khusus untuk IKL, PEMDES membawa korelasi negatif. Adapun pengaruh anggaran belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat hanya memiliki pengaruh (secara negatif) dengan IKE.

3. Korelasi IDM terhadap Anggaran Pendapatan Desa

Lebih jauh, kajian ini juga mencoba memberikan gambaran atas pengaruh kebijakan dalam bentuk anggaran pendapatan pemerintah desa terhadap indeks kemandirian. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kemandirian desa tercermin salah satunya dengan sejauh mana sebuah desa mampu menunjang pembangunan secara mandiri. Oleh karena itu, selain melihat korelasinya dengan anggaran pendapatan secara keseluruhan, kajian ini juga mencoba merinci anggaran tersebut pada dua jenis yaitu Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Penyertaan Modal Desa (PMDes).

Berikut adalah persamaan regresi yang diperoleh:

$$\text{IDM} = 0.679 + 0.040\text{PMDes}$$

Dimana:

PMDes = Anggaran Penyertaan Modal Desa (data kelompok milyar rupiah)

Persamaan ini mengeliminasi variabel independen berupa Pendapatan Asli Desa yang terbukti secara statistik tidak signifikan dalam memengaruhi IDM. Hasil serupa juga diperoleh dalam kaitannya dengan pengaruh anggaran pendapatan dengan IKE.

$$\text{IKE} = 0.495 + 0.058\text{PENDAPATAN}$$

$$\text{IKE} = 0.592 + 0.063\text{PMDes}$$

Dimana:

PENDAPATAN = Anggaran Pendapatan Desa (data kelompok milyar rupiah)

Meskipun secara keseluruhan anggaran pendapatan memiliki korelasi terhadap IKE, namun variabel PADes dan PMDes diuji secara terpisah, hanya PMDes yang secara signifikan terbukti memiliki pengaruh terhadap IKE.

TEMUAN KUNCI

Pengaruh Belanja Bidang Bersifat Parsial



Ketahanan Sosial suatu desa memperoleh pengaruh positif dari kebijakan anggaran terkait penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa.

Adapun Ketahanan Ekonomi suatu desa ternyata berbanding terbalik dengan kebijakan anggaran terkait pemberdayaan masyarakat.

Pengaruh kebijakan anggaran terkait penyelenggaraan pemerintah desa, mampu meningkatkan ketahanan sosial namun juga mengurangi ketahanan lingkungan.

Secara keseluruhan, hanya Anggaran Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan Pembangunan Desa yang mempengaruhi tingkat kemandirian desa.

Insignifikansi Pengaruh Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa



Kebijakan anggaran terkait penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa nyatanya tidak berpengaruh secara signifikan baik terhadap ketahanan sosial, ekonomi, lingkungan, maupun kemandirian suatu desa secara umum.

Signifikansi Pengaruh Penyertaan Modal Desa



Dari dua komponen pendapatan desa, ternyata Pendapatan Asli Desa tidak memiliki korelasi yang signifikan dalam mempengaruhi kemandirian suatu desa. Baik secara keseluruhan maupun parsial. Sebaliknya, kemandirian suatu desa justru berkorelasi dengan kebijakan atas penyertaan modal desa.

KETERBATASAN KAJIAN

Kajian ini menggunakan *convenient sampling* dimana *sample* diperoleh dari hasil *data mining* atas data yang dikumpulkan melalui siswaskeudes. Keterbatasan dan kelengkapan data membuat peneliti hanya berfokus pada data yang secara lengkap memiliki nilai (bukan 0 maupun null/ *not available*).

Hasil uji statistik juga menunjukkan nilai *r square* yang relatif kecil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaruh yang signifikan kebijakan anggaran pemerintah desa terhadap kemandirian suatu desa, namun pengaruh tersebut hanya menyumbangkan porsi yang sangat kecil. Artinya, masih terdapat variabel-variabel lain yang memengaruhi kemandirian desa diluar kebijakan anggaran tersebut.

SARAN TERHADAP KAJIAN SELANJUTNYA

Berikut adalah beberapa saran terhadap kajian selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya dapat mempertimbangkan penggunaan realisasi anggaran baik pendapatan maupun belanja untuk memperoleh gambaran secara tepat atas pengaruh pendapatan dan belanja desa terhadap kemandiriannya.
2. Peneliti dapat mempertimbangkan penggunaan rasio-rasio keuangan desa berdasarkan data-data anggaran maupun realisasi pendapatan dan belanja maupun neraca desa.



KESIMPULAN

Kajian ini memberikan gambaran singkat atas pengaruh masing-masing komponen anggaran belanja per bidang dan juga pendapatan terutama pendapatan asli desa dan penyertaan modal desa. Hal ini memberikan petunjuk terhadap desa untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara tepat dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian suatu desa.

Referensi

- Bahransyaf, D., & Probosiwi, R. (2013). Membangun Ketahanan Sosial di Desa Serakapi: Sebuah Replikasi Model. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 225-236.
- Epa, R., & Ra'is, D. U. (2019). Kebijakan Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(3), 88-93.
- Hadi, W. (2010). Pengaruh likuiditas dan leverage terhadap kemandirian daerah (studi terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2007 di wilayah Provinsi Aceh). *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3(1), 29-51.
- <https://www.semestapsikometrika.com/2019/06/catatan-mengenai-uji-normalitas-jangan.html>
- Priyono, B. dkk. (2019). Menuju Desa Mandiri. PUSDATIN BALILATFO Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Ramadhan, R. (2015). Analisis Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Development) PT. Sumbawa Timur Mining (Stm) Terhadap Kehidupan Sosial-ekonomi Masyarakat. *JEPE: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(1), 121-139.
- Setiawan, D., Jostenz, T. G., & Novalino, R. D. A. (2018). Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). *Ekonomi Pertahanan*, 4(3).
- Sholikhah, R. (2011). Analisis Kemampuan Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2000-2009.